



## **PENGARUH PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2011**

**Nur Baeti** ✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima Juli 2013

Disetujui Juli 2013

Dipublikasikan Agustus 2013

*Keywords:*

*Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, IPM, Unemployment, Economic Growth, Government Expenditures, Education Sector, Health Sector, HDI.*

### **Abstrak**

Pengangguran yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia di Jawa Tengah melalui pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia yang diukur dengan IPM. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel model efek tetap (FEM) dengan metode Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah diperlukan upaya dari pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah khususnya sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan IPM.

### **Abstract**

*High unemployment cause people can not maximize their welfare. The success of the economic development of an area can be seen from the high economic growth, with the increasing economic growth is also expected to improve the welfare of society and improve human development with indicators the Human Development Index (HDI). Therefore we need the government's seriousness in dealing problem with the increasing of human development in Central Java through government expenditures on education and health. This analyzed the influence of unemployment, economic growth and government expenditures on education and health to human development that measured by the HDI. The method of analysis used in this research is to use panel data regression analysis of fixed effects model (FEM) with the method of Generalized Least Square (GLS). The results from this research indicate that unemployment, economic growth and government expenditures either partially or jointly affect on HDI significantly. Suggestions relating to this research are the efforts that government need to reduce unemployment, increase the economic growth and improve the allocation of government expenditure on education and health especially to improve the quality of human development that is measured by the HDI.*

© 2012 Universitas Negeri Semarang



## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai perubahan diberbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem) dan kebebasan (freedom), yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat (Todaro, 2006:26). Kecukupan dalam hal ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan dan keamanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupannya.

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut pandangan The United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Salah satu alat ukur atau indikator yang dapat dipakai untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu membawa pada kondisi

keberhasilan pembangunan yaitu Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan. Bagi negara berkembang Menurut UNDP (dalam Ginting, 2008) menyatakan bahwa hingga pada akhir tahun 1999-an pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam sumbangsuhnya terhadap PDB nasional, pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar jika dibandingkan dengan pulau lainnya dengan perincian provinsi-provinsi di pulau Jawa yang memberikan sumbangan terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 17,81%, Jawa Timur sebesar 15,41%, Jawa Barat sebesar 14,49% dan Jawa Tengah sebesar 8,42% (BPS,2010). Dilihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional, Provinsi Jawa Tengah memiliki kontribusi yang masih terbilang rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dilihat dari besarnya laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011**

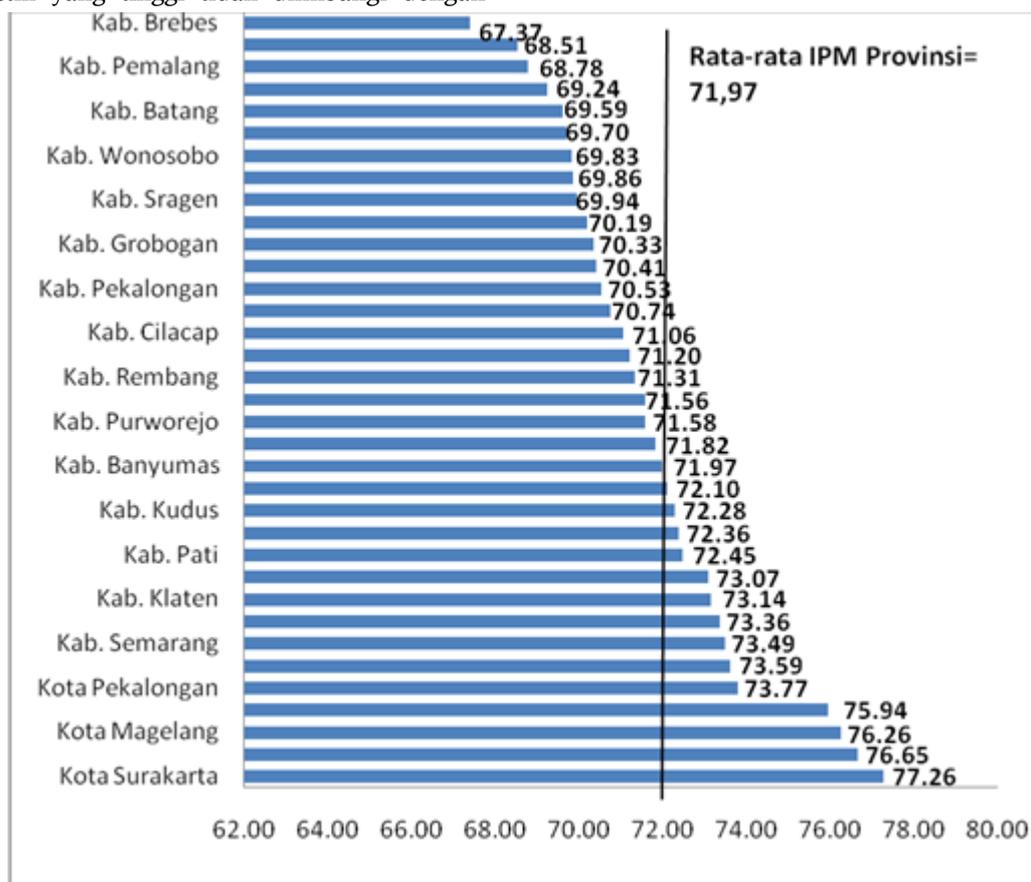
Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007	159.110.253,76	5,59
2008	168.034.483,29	5,61
2009	176.673.456,57	5,14
2010	186.995.480,65	5,84
2011	198.226.349,47	6,01

Sumber : BPS Jawa Tengah 2012

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama tahun 2007 sampai tahun 2011 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sedangkan nilai dari PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan selama tahun 2007 sampai tahun 2011. Pada tahun 2007 nilai PDRB sebesar Rp 159.110.253,76 juta dan sampai pada tahun 2011 nilai PDRB meningkat menjadi sebesar Rp 198.226.349,47 juta.

Sering kali tingginya pendapatan domestik yang tinggi tidak diimbangi dengan

pembangunan manusia yang sejalan, sehingga dapat menimbulkan adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan tidak dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun adanya IPM tidak berarti mengesampingkan peran PDRB sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, namun merupakan sebuah tantangan bagi suatu negara untuk menerjemahkan pembangunan manusia di dalamnya (Ginting, 2008).



Gambar 1 Perkembangan Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011  
Sumber: BPS Jawa Tengah 2012(data diolah)

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 di kabupaten/kota Jawa Tengah memiliki perkembangan IPM yang positif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya IPM masing-masing kabupaten/kota selama tahun 2007 sampai tahun 2011 seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Jawa Tengah. Jika

dilihat dari rata-rata IPM provinsi Jawa Tengah yang selama tahun 2007 sampai 2011 sebesar 71,97, maka seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 terdapat 20 kabupaten yang memiliki nilai IPM di bawah rata-rata IPM provinsi. Sedangkan untuk IPM seluruh kota di Jawa Tengah berada di atas rata-rata IPM provinsi. IPM tertinggi dimiliki oleh

Kota Surakarta dengan nilai sebesar 76,50 pada tahun 2007 dan 78,18 pada tahun 2011. Sedangkan nilai IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Brebes yaitu 66,50 pada tahun 2007 dan 68,61 pada tahun 2011.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih

penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pembangunan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

**Tabel 2**  
**Rata-Rata Alokasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota**  
**Di Jawa Tengah Tahun 2007-2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Rata-rata Pengeluaran	Rata-Rata	
		Kabupaten	Kota
2007	265.509.549.078	275.751.632.184	163.632.491.650
2008	309.264.091.640	330.367.341.304	205.256.051.600
2009	323.957.421.044	348.256.051.576	206.514.040.576
2010	360.046.547.137	388.723.171.607	221.442.862.195
2011	508.924.452.629	553.382.728.034	294.042.788.167

Sumber : Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan mengalami perkembangan yang positif, dimana alokasi pengeluaran sektor pendidikan selalu meningkat selama tahun 2007 sampai tahun 2011. Perkembangan rata-rata alokasi pengeluaran sektor pendidikan di wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah juga menunjukkan hubungan yang positif dengan total pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Pada tahun 2007 rata-rata pengeluaran sebesar Rp 265.509.549.078, sampai tahun 2011 pengeluaran pemerintah meningkat menjadi Rp

508.924.452.629. Rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di wilayah kabupaten dan kota juga mengalami peningkatan.

Rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di seluruh kabupaten di Jawa Tengah yang lebih tinggi daripada rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di kota-kota di Jawa Tengah, seharusnya dapat pula meningkatkan IPM di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah. Dalam kenyataannya IPM di kota-kota lebih tinggi daripada di kabupaten di Jawa Tengah. Dengan adanya peran pemerintah

dalam melakukan pengeluaran untuk sektor akses masyarakat dalam memenuhi pendidikan diharapkan dapat mempermudah mereka.

**Tabel 3**  
**Rata-Rata Alokasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2007-2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Rata-rata Pengeluaran	Rata-Rata	
		Kabupaten	Kota
2007	63.555.027.312	66.603.199.479	48.822.195.169
2008	74.221.036.852	77.203.836.838	57.804.170.266
2009	76.246.640.841	78.926.987.400	58.824.408.568
2010	90.734.274.293	93.920.671.050	75.333.356.637
2011	107.950.295.257	110.314.347.931	96.524.040.667

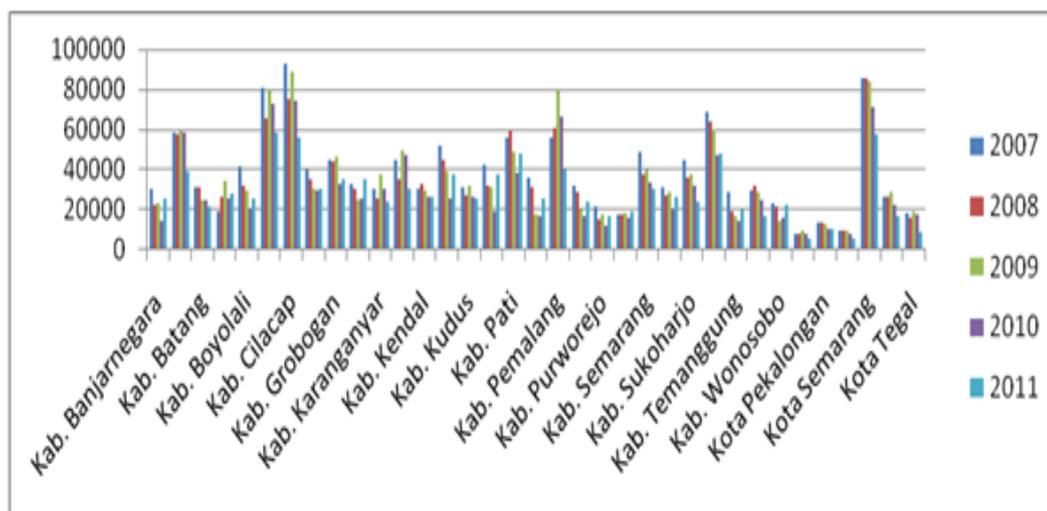
Sumber : *Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah*

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan mengalami perkembangan yang positif, dimana alokasi pengeluaran sektor kesehatan selalu meningkat selama tahun 2007 sampai tahun 2011. Perkembangan rata-rata alokasi pengeluaran sektor kesehatan di wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah juga menunjukkan hubungan yang positif dengan rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Pada tahun 2007 dan 2008 rata-rata pengeluaran kesehatan sebesar Rp 63.555.027.312 dan Rp 74.221.036.852, meningkat pada tahun 2009 rata-rata pengeluaran sebesar Rp 76.246.640.841, sampai tahun 2011 pengeluaran pemerintah meningkat menjadi Rp 107.950.295.257. Rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di wilayah kabupaten dan kota juga mengalami peningkatan.

Rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di seluruh kabupaten di Jawa Tengah yang lebih tinggi daripada rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di kota-kota di Jawa Tengah, seharusnya dapat pula meningkatkan IPM di kabupaten-kabupaten di

Jawa Tengah. Dalam kenyataannya IPM di kota-kota lebih tinggi daripada di kabupaten di Jawa Tengah. Dengan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengeluaran untuk sektor kesehatan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan IPM, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi IPM adalah pengangguran. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Mereka juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan mereka tidak terpenuhi.



Gambar 2 Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2011 (Dalam Orang)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2012

Pada Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2007 sampai tahun 2011 jumlah pengangguran di kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, rata-rata jumlah pengangguran di kota-kota di Jawa Tengah sekitar 24.286 orang, sedangkan rata-rata jumlah pengangguran di seluruh kabupaten di Jawa Tengah sebesar 35.589 orang. Secara umum, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di seluruh kabupaten lebih banyak daripada jumlah pengangguran di kota-kota di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di kota-kota lebih memadai daripada di kabupaten-kabupaten.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menurut definisi UNDP adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (people's choice). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan dan standar standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan diatas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi (Ginting, dkk, 2008).

#### Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup, tingkat pendidikan yang diukur dengan angka huruf melek pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita.

Rumus yang digunakan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Dimana :

X1 : lamanya hidup

X2 : tingkat pendidikan

X3 : standar hidup layak yang menggunakan indikator kemampuan daya beli (Badan Pusat Statistik, 2012).

Berdasarkan kajian teori pembangunan manusia maka untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dalam penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator yang digunakan untuk mencapai pembangunan manusia.

#### Pengangguran

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah

tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Menurut Sukirno (2004:13), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur.

Berdasarkan kajian teori mengenai pengangguran, maka dalam penelitian ini pengangguran yang dimaksud adalah pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik. Pengangguran terbuka tersebut meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan dunia usaha, penduduk yang merasa mungkin mendapat pekerjaan, dan yang sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai bekerja.

#### Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2006:19), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad (2004:13) diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Menurut Prasetyo (2009:237) istilah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang paling sering digunakan oleh suatu negara khususnya negara yang sedang berkembang. Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara, indikator pertumbuhan ekonomi dianggap memenuhi syarat perlu untuk digunakan sekalipun belum cukup mampu menjelaskan dengan baik.

Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Badan pusat Statistik, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (rate of economic growth), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$g = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana g adalah pertumbuhan ekonomi (Dalam Persen),  $Y_t$  adalah produk domestik regional bruto (PDRB) tahun sekarang (Dalam Rupiah), dan  $Y_{t-1}$  adalah produk domestik regional bruto (PDRB) tahun sebelumnya (Dalam Rupiah).

#### Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Guritno,1993).

#### METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, data yang diteliti meliputi data pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber data juga berasal dari Sekretaris Daerah Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan khususnya pada tahun 2007 sampai tahun 2011, data yang diteliti meliputi alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.

Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section. Data time series periode tahun 2007-2011 sedangkan data cross section adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Daerah Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### Definisi Variabel

Indeks Pembangunan Manusia yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Satuan Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian menggunakan angka indeks dalam skala 1 sampai 100.

Pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan dunia usaha, penduduk yang merasa mungkin mendapat pekerjaan, dan yang sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai bekerja. Dinyatakan dalam satuan orang.

Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Independen) adalah suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu. Data Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam satuan persen.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan adalah alokasi pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sektor pendidikan dan kesehatan dari total anggaran pendapatan dan belanja yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan

kesehatan. Dinyatakan dalam satuan milyar rupiah.

#### Analisis Panel Data

Menurut Gujarati (2010:237), data panel (pooled data) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Menurut Ajija, dkk (2011:51) ada tiga metode yang digunakan untuk mengestimasi data panel yaitu: Model Pooled Least Square (Comon Effect), Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect), Pada metode Fixed Effect estimasi dilakukan dengan pembobot (cross section weight) atau General Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross section (Gujarati, 2010:472). Model Pendekatan Efek Acak (Random Effect), Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error.

#### Spesifikasi Model Regresi

Secara ekonometrika hubungan antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap ideks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut ini:

$$IPM = \alpha_i + \beta_1 \log PNGG_{it} + \beta_2 PRTMB_{it} + \beta_3 \log PNGEL_{it} + e_{it}$$

Dimana:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia  
 LogPNGG : Jumlah pengangguran (orang)  
 PRTMB : Pertumbuhan ekonomi (persen)  
 logPNGEL : Alokasi pengeluaran pemerintah (milyar rupiah)  
 e : residual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penaksiran Model

Redundant Fixed Effect – Likelihood Ratio, Pengujian yang dapat dilakukan untuk

memilih model terbaik antara model common effect model dengan fixed effect model. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai probabilitas Cross-Section Chi-Square sebesar 0,0000 dan signifikan terhadap alpha 5% sehingga dapat diputuskan bahwa model yang dipilih menggunakan fixed effect. Correlated Fixed Effect – Hausman Test, Pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara fixed effect model dengan random effect model. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa probabilitas Cross-section random sebesar 0,0068 dan signifikan dengan alpha 5% sehingga dapat diputuskan model yang dipilih adalah dengan menggunakan fixed effect.

Model regresi pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2007-2011 dengan model fixed effect dan metode GLS, diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel penelitian dengan persamaan sebagai berikut.

$$IPM = \beta_0 - \beta_1 \logPNGG_{it} + \beta_2 PRTMB_{it} + \beta_3 \logPNGEL_{it} + e_{it}$$

$$IPM = 69,986 - 1,963809 \logPNGG_{it} + 0,136109 PRTMB_{it} + 4,601853 \beta_3 \logPNGEL_{it} + e_{it}$$

Std Error (0,317305)	(4,320799)
(0,046036)	(2,540625)
Sig	(0,0000)(0,0000)
(0,0037)	(0,0000)

#### Pembahasan

##### Pengaruh Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien negatif sebesar 1,96 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2007 sampai 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengangguran mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 1,96.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengangguran juga berkaitan erat dengan

kualitas pembangunan manusia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang. Pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Pendapatan dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam peningkatan pembangunan manusia.

##### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,14 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2007 sampai tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,14.

Adanya hubungan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia juga telah dijelaskan oleh Ramirez, dkk (dalam Brata) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah.

##### Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah yang dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien positif sebesar 4,60 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2007 sampai tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 4,60.

Pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pembangunan manusia juga disebutkan oleh Brata (dalam Ginting, 2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu determinan pembangunan manusia di Indonesia. Mardiasmo (dalam Christy, 2009) menyatakan

bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting guna meningkatkan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah, dan alokasi pengeluaran pemerintah khususnya sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### Saran

Dalam meningkatkan IPM di Jawa Tengah maka pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Upaya untuk menciptakan output daerah diharapkan akan mampu juga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan jumlah pengangguran, dan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah tersebut dapat meningkatkan IPM.

### DAFTAR PUSTAKA

Ajija, Shochrul R,dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat

Andrea Christy, Fhino Dan Priyo Hari Adi. 2009. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia". The 3rd National Conference Ukwms Surabaya, October 10th 2009. Hal 1-16

Anggaran Pengeluaran Pemerintah Per Fungsi 35 Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2007 dalam: [www.dpj.k.depkeu.go.id](http://www.dpj.k.depkeu.go.id)

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Arsyad, Lincoln. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta

Bagus Pambudi, Septian. 2008. "Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat". Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi Dan Manajemen IPB

Badan Pusat Statistik Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2012. Tabel Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (Ipm) Tahun 2005– 2011. (<http://www.google.com/url?q=http://menegp.p.go.id/V2/index.php/>). (Diakses tanggal 11 Maret 2013).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2007. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008.

Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Alokasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, Tahun 2008-2011.

\_\_\_\_\_. Alokasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, Tahun 2008-2011.

Boediono. 2008. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE

- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Gunadi Brata, Aloysius. 2002. "Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. JEP Vol 7, No. 2, 2002. Hal: 113 – 122
- Ginting S, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, Dan Kasyful Mahalli. 2008. "Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya". *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, Vol.4, No.1, Agustus 2008. Hal 17-24
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kintamani, Ida. 2008. "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)". *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, No 072, Tahun Ke-14, Mei 2008. Hal 421-437
- Ma'ruf, Akhmad dan Latri Wihastusti. 2008. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prosoeknya". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.9, Nomor 1, April 2008: 44-45
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Maryani, Tri. 2010. "Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Hal 1-15.
- Melina, Ayuningtyas. 2012. *Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. Skripsi. UNNES
- Notoatmodjo, S. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Oluwatobi, Stephen .O Dan I. Oluranti Ogunrinola. 2011. "Government Expenditure on Human Capital Development: Implications for Economic Growth in Nigeria". *Journal of Sustainable Development*, Vol. 4, No. 3; June 2011: 72-80.
- Patta, Devianti. 2011. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010 ". Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
- Prasetyo, P.Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset
- Rahayuningsih, Idha., Nurul Hidayati Dan Isa Wahyudi. 2009. "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Dampaknya Pada Peningkatan Pendidikan Kesehatan Dan Ekonomi Di Kabupaten Gresik". *Jurnal Logos* Vol. 6 No. 2 Januari 2009. Hal 256-274.
- Ranis, Gustav. 2004. "Human Development And Economic Growth". *Center Discussion Paper*, No. 887, May 2004. Page 1-13
- Robiyanto Febra, SE Akt; Saddewisasi, Wyati, SE. Msi, dan Indrayanti, Mamik, 2003. *Ekonomi Pembangunan (Pengantar Ke Pembangunan Ekonomi Indonesia)*. Semarang : Studi Nusa
- Saddewisasi, Wyati dan Teguh Ariefiantoro. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kota Semarang". *Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2011 : Hal 28 – 39

- Sarwoko. 2005. Dasar-Dasar Ekonometrika. Yogyakarta: Andi Offset
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. Indeks Pembangunan Manusia Dan Mobilitas Penduduk. <http://www.setneg.go.id>. (26 November 2012)
- Setiawan, Iwan. 2007. "Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Petani Dengan Pemanfaatan Teknologi Internet". Laporan Penelitian. Bandung: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNPAD
- Sukirno, Sadono. 2010. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers
- Sulistiyowati, Niken. Harianto, . D.S. Priyarsono dan Mangara Tambunan. 2010. "Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah". Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, September 2010, 158-170
- Suradi. 2007. "Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial: Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Nusa Tenggara Barat". Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03, 2007 : Hal 1-11
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Swamarinda, Rika Darma dan Susi Indriani. 2011. "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Jurnal Econo Sains, Vol 9, No.2, Agustus 2011: Hal 95-105
- S, Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tilaar, H.A.R. 1997. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Grasindo
- Todaro, M.P. dan Smith S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- UNDP. 2011. Human Development Report 2011. New York: Oxford University Press
- Usmaliadanti, Christina. 2011. "Analisis Pengaruh Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009". Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Undip
- Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika (Pengantar dan Aplikasinya). Yogyakarta: Ekonisia
- Widodo, Adi, Waridin, Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1.

